

**PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**

(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 29 Maret 2019/Khusus - Awal Menjabat)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIT KERJA : UNIVERSITAS GADJAH MADA
SUB UNIT KERJA : PIMPINAN UNIVERSITAS

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **DJAGAL WISESO MARSENO**
2. Jabatan : **WAKIL REKTOR BIDANG PENDIDIKAN, PENGAJARAN DAN KEMAHASISWAAN**
3. NHK : **198204**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **2.980.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 161 m²/148 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 1.700.000.000
2. Tanah Seluas 186 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 380.000.000
3. Tanah Seluas 208 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 31 m²/31 m² di SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 700.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. **340.000.000**

1. MOBIL, HONDA CIVIC SEDAN Tahun 2012, HASIL SENDIRI Rp. 230.000.000
2. MOBIL, TOYOTA AVANZA MINIBUS Tahun 2014, HADIAH Rp. 110.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. **46.700.000****D. SURAT BERHARGA** Rp. **----****E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **2.433.994.670****F. HARTA LAINNYA** Rp. **----****Sub Total** Rp. **5.800.694.670****III. HUTANG** Rp. **91.000.000****IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **5.709.694.670**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **28 Agustus 2019**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.